

# KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA TIBET MELALUI *TIBET TOURISM MASTER PLAN 2005 – 2014*

Jolyn Andrea Wardana<sup>1</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsiny<sup>2</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: jolynandrea@gmail.com, rainypriadarsini@unud.ac.id, kawitriresen@unud.ac.id

## ABSTRACT

*This research aimed to find out China's interests behind the Tibet Tourism Master Plan policy. Data was obtained through library methods such as books, scientific journals, e-books, official state documents, and related websites. Afterwards the collected data is described with descriptive qualitative method, which means the answer to research questions is explained in form of words rather than numeric. Research analysis used the concept of internal colonialism and national interests. The concept of internal colonialism helped explain the process of changing the Tibetan region into a Chinese colony and the concept of national interest analyzed China's interests behind the policy of the Tibet Tourism Master Plan. Both of these concepts have a correlation, China conditions Tibet as a colony because there are several interests that need to be achieved. The result obtained was that there are economic and hegemony interests that China wants to achieve in developing tourism in Tibet.*

**Keywords:** *Chinese Occupation, Tibet Tourism Master Plan, Internal Colonialism, National Interest*

## 1. PENDAHULUAN

Setelah lebih dari 60 tahun pasca okupasi Tiongkok atas Tibet, kehidupan masyarakat Tibet masih tergolong terbelakang. Sebelum menjadi bagian dari Tiongkok, di tahun 1911 – 1949, Tibet merupakan negara independen. Kemerdekaan Tibet belum diakui oleh negara lain, sehingga dapat dikatakan Tibet merdeka secara *de facto* (Soyomukti, 2008). Merdeka secara *de facto* berarti saat itu Tibet telah memiliki pemerintahan, bendera nasional, militer, paspor, serta mata uang sendiri, dengan Dalai Lama sebagai pemimpin politik dan spiritual.

Okupasi Tiongkok dimulai pada tahun 1950 dan tentu tidak berjalan lancar.

Masyarakat Tibet melakukan perlawanan karena selama ini mereka tidak merasa sebagai bagian dari Tiongkok. Pemerintah Tiongkok kemudian mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat untuk meredam pemberontakan serta menangkap Dalai Lama yang merupakan pemimpin Tibet karena dianggap sebagai dalang pemberontakan. Kekacauan yang terjadi memaksa Dalai Lama bersama 80.000 pengikutnya mencari suaka politik ke Dharamsala, India Utara, dan mendirikan pemerintahan sementara di sana.

Setelah kepergian Dalai Lama, Tiongkok mulai menerapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah aneksasi Tibet. Sektor pariwisata Tibet baru dibuka di

tahun 1981, itupun harus melalui pemerintah Tiongkok karena hanya beberapa lokasi yang boleh dikunjungi wisatawan. Tiongkok hanya menerima 2000 wisatawan per tahun mengingat ketidakstabilan politik yang terjadi di Tibet pada saat itu (Dreyer, 2005). Terdapat kekhawatiran pemberontakan yang dilakukan Tibet akan menarik dukungan internasional apabila akses menuju Tibet langsung dibuka secara besar-besaran.

Pembukaan sektor pariwisata Tibet tentu menarik minat banyak wisatawan. Di tahun yang sama pariwisata Tibet baru dibuka, tercatat kunjungan mencapai 1.059 wisatawan. Angka tersebut empat kali lebih tinggi dibanding akumulasi kunjungan menuju Tibet dari tahun 1959-1979 (Tsering, 2017). Tiongkok memanfaatkan peluang ini dengan membuka kran pariwisata Tibet untuk umum di tahun 1983. Pariwisata Tibet tidak lagi dikelola langsung oleh pemerintah pusat Tiongkok tetapi disediakan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian dari pariwisata, dengan tetap dibawah pengawasan Tiongkok.

Bersamaan dengan dibukanya pariwisata Tibet secara independen, Tiongkok juga meluncurkan program migrasi etnis Han. Di tahun 1983, Tiongkok menghapus restriksi tinggal dan ijin kerja di Tibet yang menyebabkan masuknya 50.000 pekerja Han ke Tibet (Tsering, 2017). Tiongkok mengklaim kemudahan migrasi dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan Tibet dengan menyediakan tenaga kerja terlatih. Selain itu, Etnis Han sebagai etnis yang mendominasi Tiongkok, diharapkan

mampu mengasimilasi masyarakat Tibet ke dalam Tiongkok.

Sekilas kemudahan pariwisata dan akses menuju Tibet terlihat berhasil meningkatkan jumlah wisatawan. Terbukti di tahun 1987, kunjungan menuju Tibet meningkat hingga 43.000 wisatawan dengan keuntungan yang diperoleh Tiongkok mencapai 130 juta Yuan (Luo, 2008). Masyarakat Tibet tidak merespon positif perubahan tersebut karena keuntungan yang diperoleh hanya masuk ke dalam Tiongkok. Ditambah pula dengan masuknya etnis Han sebagai tenaga kerja ternyata lebih banyak menyerobot peluang bisnis.

Berbagai penyimpangan yang dilakukan Tiongkok menyebabkan gerakan pro-kemerdekaan Tibet masih gencar dilakukan. Protes terjadi lagi di tahun 1987 karena Tiongkok menolak proposal damai yang diajukan Dalai Lama. Untuk mengendalikan situasi, Tiongkok menerapkan darurat militer atas Tibet di tahun 1989. Akibatnya, akses pariwisata menuju Tibet ditutup total. Darurat militer dicabut pada tahun 1990, namun keamanan atas Tibet tetap dijaga ketat. Akses media serta internet ditutup oleh pemerintah Tiongkok dan tidak diberi ruang gerak untuk menyiarkan. Dapat dikatakan secara tidak langsung Tiongkok mengisolasi Tibet dari dunia luar.

Setelah melakukan isolasi selama beberapa tahun, Tiongkok membuat kebijakan baru atas Tibet yang memungkinkan Tibet untuk lebih terbuka pada dunia luar. Pada tahun 2005, Tiongkok memperkenalkan kebijakan *Tibet Tourism*

*Master Plan* dengan jangka waktu 15 tahun (2005-2020). *Tibet Tourism Master Plan* merupakan respon dari program UNDP, *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme* yang memiliki subprogram, antara lain; 1. Memperkuat sektor pariwisata untuk pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, 2. Pengembangan investasi dan perdagangan dalam wilayah Tibet, 3. Pengembangan industri tradisional, 4. Perlindungan dan pembangunan Kota Lhasa, dan 5. Merintis *Tibet Development Forum* sebagai platform dialog regional.

Tiongkok benar-benar antusias dalam menjadikan Tibet sebagai bagian dari destinasi pariwisata Tiongkok. Segala proyek yang mempermudah akses menuju Tibet dipercepat pembangunannya. Salah satunya, pada bulan Juli 2006 dibuka jalur kereta api baru Qinghai-Tibet untuk memudahkan wisatawan dan imigran memasuki Tibet. Hingga tahun 2008, hampir semua daerah dapat menjangkau Tibet dengan mudah. Total pembangunan tersebut menghubungkan Tibet dengan lima jalan raya, 15 jalan utama, 375 jalan cabang, dan satu jalur kereta api.

Proyek pembangunan yang dilakukan Tiongkok terlihat seperti menghapus isolasi atas Tibet namun pada kenyataannya ruang gerak masyarakat Tibet tetap dibatasi. Segala pembangunan hanya diperuntukkan bagi wisatawan dan imigran, bahkan jumlah imigran di Lhasa telah mengalahkan jumlah masyarakat lokal Tibet. Sehingga gerakan pro-kemerdekaan tidak lagi berani dilakukan. Minimnya keuntungan yang didapat oleh masyarakat Tibet membuat

*Tibet Tourism Master Plan* menjadi menarik untuk diteliti. Perlu dilihat lebih lanjut kepentingan yang sebenarnya ingin dicapai Tiongkok mengingat hubungan Tiongkok dan Tibet lebih banyak bersifat eksploitatif dengan disertai tindakan koersif.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Tulisan ini menggunakan dua penelitian ilmiah sebagai kajian pustaka. Tulisan pertama adalah artikel *Internal Colonialism and China's Uyghur Muslim Minority* oleh Dru C. Gladney. Artikel ini memaparkan tentang etnis Uighur yang menjadi objek kolonialisasi internal Tiongkok. Pemberontakan Yakub Beg di akhir abad ke-19 mengindikasikan upaya Uighur untuk melawan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok. Upaya ini gagal dan dilanjutkan dengan Tiongkok mengklaim Uighur sebagai bagian dari Tiongkok ditahun 1956 dengan nama *Uyghur Autonomous Region*. Tiongkok kemudian mengimplementasi 'integrasi melalui migrasi' dengan memasukan etnis Han, yang merupakan etnis dominan, ke wilayah Uighur. Model kolonialisme internal mulai terlihat ketika Tiongkok melakukan eksploitasi sumber daya mineral dan petrokimia untuk dijual di pasar internasional. Selain itu, pengembangan pariwisata juga dilakukan di wilayah Uighur sebagai kawasan jalur sutra.

Sama seperti di Tibet, kolonialisasi yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uighur tidak berjalan mulus. Etnis Uighur beberapa kali melakukan pemberontakan

dan usaha separatis, misalnya pada 25 Februari 1997, pengeboman di memorial Deng Xiaoping dan 7 Maret 1997 pengeboman bus di Beijing. Pelaku dari kedua peristiwa tersebut disinyalir sebagai separatis Uighur. Tiongkok tidak merasa terancam atas usaha separatis yang dilakukan Uighur. Secara jumlah dan kelengkapan persenjataan, kelompok separatis tidak mampu melawan *People's Liberation Army* dan *People's Police*. Satu-satunya cara agar kelompok separatis didengar oleh pemerintah adalah dengan menarik perhatian dunia internasional atau dengan menggalang dukungan dari etnis mayoritas. Tapi cara tersebut juga tidak mudah dicapai, mengingat etnis Han sebagai mayoritas mendapat keuntungan secara ekonomi dari okupasi yang dilakukan Tiongkok.

Tulisan diatas membantu penulis dalam melihat cara Tiongkok dalam melakukan kolonialisasi internal. Uighur memiliki kesamaan dengan Tibet, yaitu wilayahnya sama-sama terokupasi kemudian dipaksa berintegrasi dengan Etnis Han yang masuk ke wilayah tersebut. Tiongkok melihat bahwa penempatan etnis mayoritas ke dalam wilayah yang rentan terhadap gerakan separatis akan memperkecil peluang wilayah tersebut untuk memisahkan diri. Program migrasi etnis ini kemudian sama-sama memicu kesenjangan di wilayah Uighur dan Tibet. Hal ini disebabkan karena ketimpangan pendidikan serta ketidaksiapan masyarakat asli terhadap persaingan ekonomi modern. Dapat dilihat juga bahwa Tiongkok melihat

pertambahan dan pariwisata sebagai dua aktivitas ekonomi yang nantinya mampu mengintegrasikan etnis minoritas ke dalam Tiongkok.

Tulisan kedua yang penulis gunakan sebagai kajian pustaka adalah jurnal *The Political Use of Tourism: A Philippine Case Study* karya Linda Richter. Salah satu fokus Presiden Marcos dalam reformasi *The New Society* di Filipina adalah sektor pariwisata. Sektor ini dianggap penting karena dapat merangsang pembangunan dan stabilitas tanpa membutuhkan kebebasan politik. Pariwisata tidak hanya dilihat sebagai cara untuk meningkatkan devisa, namun juga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan politik. Keuntungan politik yang dimaksud mencakup legitimasi, citra di mata internasional, serta patronase.

Pengeluaran terbesar Presiden Marcos dalam sektor pariwisata terletak pada perbaikan infrastruktur. Perbaikan bandara, pelabuhan, serta akses jalan raya dipercepat pembangunannya. Untuk mendukung pariwisata, pemerintah lebih mendahulukan pembangunan hotel mewah daripada relokasi dan perumahan rakyat. Dalam hubungannya dengan promosi pariwisata, Departemen Pariwisata mengundang penulis perjalanan dan pemandu wisata untuk mengunjungi Filipina. Kelompok tersebut dipilih karena dianggap tidak mengerti isu kebebasan politik sehingga kemungkinan untuk berbalik mengkritik pemerintah relatif kecil.

Setelah melakukan perbaikan infrastruktur dan promosi skala kecil,

Pemerintah Filipina siap untuk menunjukkan 'normalisasi' Filipina di mata dunia internasional melalui pariwisata. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menjadi tuan rumah untuk perhelatan *The Miss Universe* di tahun 1974 dan *World Bank Conference* di tahun 1976. Dua perhelatan tersebut berhasil berpengaruh besar terhadap citra Filipina. Delegasi yang hadir nampak terkesan dengan stabilitas dan pertumbuhan Filipina serta daya tarik masyarakat lokal. Liputan jurnalis internasional terkait perhelatan tersebut juga turut membantu menciptakan citra positif bagi Filipina.

Jurnal tulisan Linda Ritcher diatas memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini, yaitu Pemerintah Filipina dan Pemerintah Tiongkok berfokus pada perbaikan infrastruktur untuk memperlancar pariwisata. Perbaikan infrastruktur ini kemudian memudahkan kedua belah pihak untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Perhelatan dua ajang internasional dan undangan bagi pemandu wisata serta penulis perjalanan merupakan cara Pemerintah Filipina untuk menciptakan citra positif. Hal ini serupa dengan pelaksanaan *Tibet Development Forum* yang berisikan pencapaian Tibet setelah menjadi bagian Tiongkok. Selain itu, terdapat persamaan bahwa kedua negara sempat melakukan isolasi di daerahnya dan kemudian mencabut isolasi dengan membuka pariwisata.

### 3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang berarti menggambarkan secara deskriptif melalui penggunaan kata-kata atau kalimat terhadap suatu studi kasus tertentu untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian yang akan diteliti (Moleong, 2007). Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini akan menjabarkan kepentingan Tiongkok dalam mengembangkan pariwisata Tibet.

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit analisis negara. Kepentingan Tiongkok yang dijabarkan dalam penelitian ini merepresentasikan entitas negara. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan literatur yang mendukung, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, *e-book*, dokumen resmi negara, serta website terkait. Penulis menggunakan dengan teknik penyajian data tematis, yang mana hasil analisis yang diperoleh dibagi ke dalam beberapa sub-bab. Tiap sub-bab membahas tema yang berbeda untuk mempermudah pembaca dalam memahami konteks penelitian. Penyajian data juga disertai dengan tabel, bagan, dan gambar yang mendukung penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Kolonialisme Internal dan Pariwisata Tibet

Sebelum kedatangan Tiongkok, Tibet merupakan negara independen yang

menjalankan fungsinya sebagai negara normal. Kemerdekaan Tibet tidak diakui oleh negara lain sehingga dapat dikatakan Tibet memiliki status independen secara *de facto* (Soyomukti, 2008). Status independen Tibet berlangsung dari tahun 1911 – 1949 sebelum akhirnya terusik ketika pemerintah Tiongkok melalui Tentara Pembebasan Rakyat memasuki wilayah Tibet di tahun 1950. Partai Komunis Tiongkok mengklaim bahwa Tibet selama ini merupakan bagian dari Tiongkok hanya saja tidak tersentuh pemerintah pusat karena sulitnya akses menuju Tibet. Kedatangan Tentara Pembebasan Rakyat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat Tibet. Dalai Lama, sebagai pemimpin spiritual Tibet dan Budhisme, berusaha menghindari konflik dan mengusulkan jalan tengah agar tercipta kesetaraan antara Tibet dan Tiongkok. Akhirnya pada 23 Mei 1951, Tiongkok dan Tibet meratifikasi *Seventeen Point Agreement* dengan poin pokok bahwa Tibet mendapatkan otonomi khusus apabila bergabung dengan pemerintah Tiongkok.

Dalam pelaksanaannya, Tiongkok melanggar *Seventeen Point Agreement* dengan menerapkan kerja paksa bagi masyarakat Tibet serta membatasi wewenang Dalai Lama selaku pemimpin Tibet. Kekejaman yang dilakukan Tiongkok menyebabkan pecahnya pemberontakan oleh masyarakat Tibet pada Maret 1959. Pemerintah Tiongkok kemudian mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat untuk meredam pemberontakan serta menangkap Dalai Lama karena dianggap sebagai dalang pemberontakan. Kekacauan

yang terjadi memaksa Dalai Lama bersama 80.000 pengikutnya mencari suaka politik ke Dharamsala, India Utara, dan mendirikan pemerintahan sementara di sana.

Setelah kepergian Dalai Lama, Tiongkok menerapkan kebijakan yang lebih bersifat ketat untuk aneksasi Tibet. Bercermin dari pemberontakan sebelumnya, Tiongkok merasa bahwa pemberontakan terjadi karena masyarakat Tibet belum terasimilasi penuh dengan masyarakat Han. Selain itu, kurangnya tenaga kerja ahli di Tibet dirasa menghambat rencana pembangunan. Di awal okupasi, Tiongkok memang sudah melakukan transfer populasi dari *mainland* menuju Tibet. Namun, pada saat itu masyarakat Han hanya ditempatkan sebagai tentara dan staf administrasi untuk Tibet. Di tahun 1983, Tiongkok mengubah kebijakannya menjadi lebih fleksibel untuk ijin kerja dan ijin tinggal di Tibet (Tsering, 2017). Sehingga dapat menarik minat masyarakat Han untuk migrasi ke Tibet.

Pada waktu itu, pariwisata dilihat sebagai sumber pendapatan yang potensial bagi Tibet. Mengembangkan pariwisata di Tibet, berarti memperkenalkan kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum ada di wilayah tersebut. Sektor pariwisata Tibet baru dibuka di tahun 1981, itupun harus melalui pemerintah Tiongkok karena hanya beberapa lokasi yang boleh dikunjungi wisatawan. Tiongkok mulai melonggarkan pembatasan itu ketika ijin kerja dan ijin tinggal masyarakat Han ke Tibet menjadi lebih fleksibel. Tenaga kerja Han yang masuk ke Tibet membludak. Tercatat hingga tahun 1984, 60.000 tenaga kerja Han dari

20 provinsi di mainland telah masuk ke Tibet untuk mengerjakan proyek baru (Tsering, 2017). Tiongkok kemudian membuka wilayah Tibet untuk pariwisata massal serta meresmikan *Tourism Corporation of TAR* sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pariwisata Tibet, dengan tetap dibawah pengawasan Tiongkok.

Pariwisata menuju Tibet terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Pariwisata yang disediakan 'dari atas' oleh pemerintah Tiongkok melalui *China International Travel Service* (CITS) yang terorganisir dalam grup. (2) Pariwisata yang disediakan 'dari bawah' oleh masyarakat lokal yang melayani wisatawan independen (Cultural Survival, 2010). Grup tur yang disediakan oleh CITS lebih banyak berisikan propaganda. CITS berusaha menunjukkan bahwa Tibet berkembang secara progresif berkat reformasi komunis Tiongkok. Dengan tujuan propaganda tersebut, lowongan pemandu wisata CITS hanya diisi oleh masyarakat Han.

Propaganda CITS berhasil meyakinkan wisatawan lokal bahwa Tibet seharusnya berterima kasih atas liberasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Sedangkan wisatawan asing tidak dengan mudah percaya. Mereka merasa bahwa yang ditunjukkan dalam grup tur merupakan versi Tiongkok dari budaya asli Tibet. Wisatawan asing ingin melihat Tibet sebagaimana adanya sebelum okupasi Tiongkok, oleh sebab itu, banyak wisatawan asing yang diam-diam memisahkan diri dari CITS dan mendekati masyarakat Tibet asli sebagai

pemandu wisata dengan jaminan bayaran lebih (Cultural Survival, 2010).

Pariwisata 'realistis' dari masyarakat Tibet ini merupakan aset yang tidak bisa ditawarkan Tiongkok. Tur yang disediakan masyarakat Tibet lokal dan pengunjung menekankan pada budaya asli Tibet dan perbedaan Tibet dengan Tiongkok, berbeda dengan yang disediakan CITS. Ketika itu, masyarakat Tibet juga masih gencar menginginkan kemerdekaan. Sebagai imbalan atas hospitaliti yang diberikan, masyarakat Tibet berharap wisatawan menyebarkanluaskan kekejaman okupasi Tiongkok di negara asalnya nanti. Kehadiran wisatawan asing secara tidak langsung menjadi medium artikulasi nasionalisme Tibet, baik antara masyarakat Tibet setempat atau di pengasingan Dharamsala (Cultural Survival, 2010). Bagi masyarakat Tibet, bekerja dalam sektor pariwisata ini kemudian tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi tetapi juga tindakan patriotisme.

Empat tahun setelah pariwisata Tibet dibuka, dunia mulai mengetahui potensi dan keunikan Tibet, serta gerakan kemerdekaan yang sedang diperjuangkan. Di tahun yang sama, protes besar terjadi lagi karena Tiongkok menolak proposal damai yang diajukan Dalai Lama dari tanah pengasingan. Selain karena penolakan proposal, kombinasi dari perkembangan wisata yang cepat, kelonggaran terhadap restriksi puluhan tahun, dan kembalinya masyarakat Tibet pengasingan untuk mencari pekerjaan di sektor pariwisata adalah penyebab lain dari pemberontakan ini.

Pemberontakan tersebut menuai perhatian dunia internasional. Laporan wisatawan yang menyaksikan langsung penindasan Tiongkok memenuhi media dan bahkan dibahas di Kongres Amerika Serikat (Cultural Survival, 2010). Beberapa wisatawan juga membentuk kelompok advokasi untuk hak asasi manusia di Tibet serta melakukan demonstrasi di depan konsulat Tiongkok. Untuk mengendalikan situasi, Tiongkok menerapkan darurat militer atas Tibet dan menutup akses pariwisata serta informasi menuju Tibet. Hilangnya kontrol politik merupakan konsekuensi liberalisasi ekonomi yang tidak dapat ditoleransi Tiongkok. Tiongkok menuduh wisatawan asing sebagai 'agen luar' para nasionalis Tibet. Oleh sebab itu, pariwisata independen tidak diijinkan lagi di Tibet dan semua kembali diintegrasikan melalui pemerintah Tiongkok (Cultural Survival, 2010). Pemandu wisata yang masyarakat Tibet asli akan dipecah apabila terbukti memiliki pandangan politik yang mencurigakan. Sehingga kemudian, jasa pemandu wisata lebih banyak diisi oleh masyarakat Han.

Di tahun 1990, darurat militer atas Tibet dicabut namun keamanan tetap dijaga ketat. Akses media serta internet ditutup oleh pemerintah Tiongkok dan tidak diberi ruang gerak untuk menyiarkan. Ruang gerak masyarakat Tibet juga dibatasi. Pembatasan ini dilakukan semata-mata untuk 'memastikan keamanan absolut atas budaya Tibet' (Human Rights Watch, 2012). Dapat dikatakan secara tidak langsung Tiongkok mengisolasi Tibet dari dunia luar.

Dinamika Tiongkok dan Tibet mencerminkan hubungan struktural yang terjadi akibat kolonisasi internal yang dilakukan Tiongkok. Dimulai dari okupasi di tahun 1950, kemudian kerja paksa bagi masyarakat Tibet, migrasi masyarakat Han menuju Tibet, modifikasi terhadap budaya asli Tibet, hingga pembatasan ruang gerak masyarakat Tibet. Seluruh peristiwa tersebut menghasilkan standar hidup yang berbeda antara masyarakat Tibet dengan masyarakat Han sebagai pendatang. Masyarakat yang 'ditundukkan' tidak hanya kehilangan kebebasan untuk memerintah wilayahnya sendiri tetapi juga tidak mampu mencari nafkah dengan cara-cara mereka terdahulu (Birch, 1989). Sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pasti terjadi, mereka tidak serta merta memberdayakan atau memperkaya Tibet.

#### **4.2. Pelaksanaan *Tibet Tourism Master Plan***

Sejak tahun 1992, Tiongkok melirik sektor pariwisata domestik sebagai salah satu pilar ekonomi. Hal ini dikarenakan pariwisata domestik telah melampaui pariwisata internasional dan menjadi sumber utama pendapatan sektor pariwisata. Tiongkok melihat bahwa pariwisata Tibet memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat besarnya minat wisatawan menuju Tibet sebelum Tibet diisolasi. Setelah isolasi dicabut, kondisi Tibet dapat dikatakan telah stabil dan layak dikomersilkan kembali untuk wisatawan domestik. Namun, kendala utama menuju



Tibet adalah akses, karena Tiongkok tidak membuka Tibet secara penuh terlebih bagi wisatawan asing.

Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi Tiongkok, karena apabila akses dibuka secara besar-besaran maka Tibet rentan melakukan pemberontakan lagi dan menjadi sorotan dunia internasional. Tiongkok kemudian melihat secara garis besar. Sejauh ini, Tibet merupakan etnis minoritas yang menerima subsidi paling besar dari Tiongkok sejak awal okupasi (Case Western University, t.th). Ketika akses Tibet sempat dibuka, pendapatan di bidang pariwisata meningkat drastis dari 1,8 juta Yuan di tahun 1984 menjadi 213,8 juta Yuan di tahun 1995. Apabila restriksi akses tetap dilakukan, maka pengembangan ekonomi Tibet secara keseluruhan akan terhambat, termasuk dalam sektor pariwisata. Yang berarti, Tiongkok tidak mendapatkan keuntungan balik.

Akhirnya, di tahun 2005 terjadi momentum perubahan sikap Tiongkok atas Tibet. Tiongkok tidak lagi berfokus pada industri sekunder Tibet, seperti pertambangan, tapi berfokus pada industri tersier, yaitu pariwisata. Keseriusan Tiongkok dalam mengembangkan industri tersier ditunjukkan dengan mengaplikasikan kebijakan *Tibet Tourism Master Plan* yang berjangka waktu 15 tahun (2005-2020). *Tibet Tourism Master Plan* merupakan respon dari *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme* yang merupakan kerja sama pemerintah Tiongkok dengan United Nations Development Programme (UNDP). Secara garis besar, program UNDP

tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Tibet sekaligus memproteksi budaya asli Tibet.

UNDP menyoroti Tibet yang masih tertinggal dari daerah lain di Tiongkok dalam hal pembangunan manusia. Sumber potensial pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh kondisi yang keras, sumber daya yang langka, dan infrastruktur yang tidak memadai. Pertumbuhan yang terjadi terkonsentrasi di kota-kota dan menghasilkan sedikit manfaat bagi etnis Tibet, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan kurang keterampilan dibandingkan dengan pekerja migran dari bagian lain di Cina (UNDP, 2006).

Perhatian UNDP atas Tibet mengesankan bahwa kebijakan pemerintah Tiongkok tidak menghasilkan apa-apa selain marginalisasi penduduk Tibet, arus migrasi etnis Han ke dataran tinggi Tibet, dan upaya terus-menerus untuk memusnahkan dan memodifikasi budaya asli Tibet. Tiongkok kemudian 'menampik' sorotan UNDP dengan menginisiasi *Tibet Tourism Master Plan*. Melalui program ini, Tiongkok ingin menunjukkan komitmennya dalam merestorasi Tibet. Dapat dikatakan bahwa perubahan sikap Tiongkok atas Tibet disebabkan oleh UNDP. Namun, meskipun saling bersinergi, *Tibet Tourism Master Plan* dan *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme* memiliki perbedaan fokus. *Tibet Tourism Master Plan* merupakan inisiasi Pemerintah Tiongkok dan berfokus pada perbaikan infrastruktur serta modernisasi Tibet untuk kelancaran pariwisata. Sedangkan *Tibet Development*

*and Poverty Alleviation Programme* berfokus pada perlindungan dan revitalisasi budaya Tibet yang nantinya menyediakan sumber pekerjaan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan.

Dalam pelaksanaan master plan, segala proyek yang mempermudah akses menuju Tibet dipercepat pembangunannya. Hingga tahun 2008, hampir semua daerah dapat menjangkau Tibet dengan mudah. Total pembangunan tersebut menghubungkan Tibet dengan lima jalan raya, 15 jalan utama, 375 jalan cabang, dan satu jalur kereta api. Dari seluruh infrastruktur yang dibangun, Tiongkok paling menunjukkan kebanggaannya pada pembangunan jalur kereta api Qinghai - Tibet. Jalur kereta tersebut merupakan tertinggi di dunia dan kalayang yang dioperasikan juga merupakan yang pertama beroperasi di dunia (Lafitte, 2017).

Pembangunan jalur kereta Qinghai – Tibet memakan waktu lima tahun, dari tahun 2001 hingga diresmikan pada 2006. Kalayang sepanjang 1.956 kilometer yang dibangun dengan biaya 33 milyar Yuan tersebut adalah kereta api pertama yang menghubungkan Tibet dengan dunia luar. Tiongkok merasa modernisasi regional telah tercapai, dalam arti transportasi dari Tibet ke provinsi dataran rendah, dapat diakses melalui jalan raya, kereta api, atau jalur udara.

*Tibet Tourism Master Plan* telah membuka keran pariwisata Tibet. Setelah dibukanya jalur kereta Qinghai - Tibet pada tahun 2006, setiap harinya, kalayang

tersebut membawa wisatawan domestik dalam paket wisata “Tibet-Tiongkok” (Lafitte, 2017). Jumlah wisatawan meningkat hingga 36% yang mana 93% diantaranya adalah masyarakat lokal Tiongkok. Pada sepuluh bulan pasca kereta api beroperasi, Tibet mendatangkan 3,72 juta wisatawan yang meningkat 64% dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, hanya 350.000 yang merupakan wisatawan asing.

Bagi wisatawan asing, pariwisata Tibet ditutup setidaknya sekali atau dua kali dalam setahun. Pemerintah Tiongkok biasanya menutup akses wisatawan asing di bulan Februari atau Maret mengingat bulan tersebut identik dengan bulan peringatan okupasi Tiongkok atas Tibet. Pemerintah Tiongkok berdalih bahwa penutupan ini dilakukan karena mereka belum bisa menyediakan pariwisata dengan *world class service* di Tibet (The Strait Times, 2016). Namun sebenarnya, mereka memang lebih berfokus pada peningkatan wisatawan domestik karena cenderung tidak bersimpati dengan sentimen anti-Tiongkok di Tibet. Sehingga kemudian, apabila terjadi protes, Tiongkok tidak lagi disorot dunia internasional.

#### **4.3. Analisa Kepentingan Tiongkok Mengembangkan Pariwisata Tibet Melalui *Tibet Tourism Master Plan***

Subbab 4.2 telah menjelaskan bahwa strategi ekonomi baru untuk Tibet adalah ekspansi industri tersier. Konsekuensinya, akses menuju Tibet harus dibuka secara

besar-besaran. Setahun setelah kereta beroperasi, Xinhua, melaporkan bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi Tibet meningkat lebih dari 60 persen dari tahun sebelumnya, menghasilkan pendapatan pariwisata sekitar 5,5 miliar dolar US. Pembangunan kalayang ini juga memudahkan perpindahan para migran dengan orientasi ekonomi seiring dengan dibukanya pariwisata Tibet.

Selanjutnya, pemerintah Tiongkok mengalami perdebatan panjang dalam hal penyediaan jasa pariwisata di Tibet. Ada kubu yang ingin menganggap serius keunikan Tibet namun ada juga yang ingin memperlakukan Tibet sama seperti daerah-daerah lain di Tiongkok (Sautman, 2002). Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk memperlakukan Tibet sama seperti daerah lainnya. Ini karena wisatawan lokal yang masuk masih memiliki kecenderungan menggunakan jasa wisata dari masyarakat Han ketimbang masyarakat Tibet. Hotel, restoran, serta tempat hiburan dibuat dengan standar Tiongkok serta dipenuhi oleh pekerja Han-Tiongkok. Masyarakat Tibet memandang ini sebagai kebijakan "genosida budaya" yang disengaja (Yeh, 2013).

Situasi ini didukung oleh Pemerintah Tiongkok sendiri. Grup tur dari pemerintah lebih banyak menggunakan masyarakat Han sebagai jasa pemandu wisata untuk mempermudah propaganda. Di tahun 2003, Pemerintah Tiongkok memecat 160 pemandu wisata yang merupakan masyarakat Tibet karena kecurigaan tentang pandangan politik mereka.

Kemudian, pemerintah Tiongkok mendatangkan kurang lebih 100 pemandu wisata dari mainland ke Tibet tiap tahunnya sebagai pengganti. Pemandu wisata tersebut diberi pesan oleh perwakilan partai untuk terus 'mempertahankan kesadaran politik dan mempropagandakan Tibet dengan baik' (Save Tibet, 2008).

Migrasi etnis Han menuju Tibet merupakan topik yang sensitif bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memberikan sedikit informasi publik mengenai hal tersebut dan seringkali statistik yang disediakan bersifat tidak konsisten. Laporan yang dipublikasikan menggeneralisir penumpang kereta api sebagai 'wisatawan', terlepas dari tujuan masuk ke Tibet untuk benar berwisata atau mencari pekerjaan. Disinyalir jumlah masyarakat Han di Lhasa telah melebihi jumlah penduduk asli Tibet. Dari tahun 2006 hingga 2010, terhitung 1,3 juta masyarakat Tibet yang berdomisili di Lhasa telah diusir dari tempat tinggalnya untuk direlokasi ke wilayah lain yang lebih sepi pengunjung (BBC, 2010). Pemerintah Tiongkok kemudian menawarkan orang Han untuk menetap di Lhasa serta menawarkan posisi dan promosi baru di birokrasi, yang hanya tersedia bagi orang Han. Kebijakan ini mengakibatkan Tibet menjadi provinsi dengan kesenjangan urban-rural tertinggi di Tiongkok, melebihi provinsi lain (Fischer, 2004).

Pemerintah Tiongkok berdalih bahwa wilayah Tibet masih didominasi oleh orang Tibet asli. Namun yang menjadi permasalahan adalah masyarakat tersebut

lebih banyak menempati daerah rural ketimbang turut menikmati kesempatan ekonomi di daerah urban seperti Lhasa (Fischer, 2006). Maka tak heran kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa Tiongkok ingin menguasai potensi komersil yang dimiliki Tibet dan mengasimilasi minoritas Tibet. Otoritas Tiongkok bersikeras bahwa para migran harus disambut dengan tangan terbuka sebagai agen pembangunan yang membawa kemajuan yang sangat dibutuhkan oleh Tibet (Yeh, 2013). Sehingga, dalam kebijakan *Tibet Tourism Master Plan*, terlihat adanya kepentingan dominasi ekonomi bagi masyarakat Han-Tiongkok di Tibet.

Selain kepentingan ekonomi, kebijakan Tibet Tourism Master Plan juga berisi kepentingan politis terkait usaha Tiongkok mempertahankan wilayah Tibet. Wilayah Tibet merupakan seperempat dari wilayah daratan Tiongkok. Oleh sebab itu, pemberontakan serta tuntutan masyarakat Tibet untuk mendapat otonomi penuh atas wilayah administratif "Tibet Raya" dipandang sebagai ancaman kedaulatan oleh Tiongkok. Tiongkok berusaha mempertahankan hegemoninya dengan memberi pembangunan di wilayah Tibet.

Pembangunan menegaskan bahwa orang Tibet masih akan terjebak dalam keadaan keterbelakangan dan kemiskinan seperti di tahun 1950-an, kalau bukan karena hadiah pembangunan yang murah hati dari Tiongkok (Yeh, 2013). Jalur kereta Qinghai-Lhasa adalah yang pertama dan terpenting sebagai simbol keberadaan Tiongkok di Tibet. Seperti yang dikatakan

oleh presiden Tiongkok, Jiang Zemin, pada tahun 2001, "Beberapa orang menyarankan saya untuk tidak melanjutkan proyek ini karena tidak layak secara komersial. Saya mengatakan ini adalah politik". Pernyataan yang mirip juga disampaikan oleh kepala arsitek perencanaan transportasi Tiongkok, Wang Derong, kepada majalah Fortune pada Juni 2006, sebulan sebelum kalayang dioperasikan, "Salah satu alasan terpenting untuk pembangunan kereta api adalah stabilitas politik. Pejabat pemerintah tidak berusaha menyembunyikan tujuan itu." (Save Tibet, 2008)

Hadiah pembangunan Tiongkok, tidak hanya untuk orang Tibet tetapi untuk semua etnis minoritas, berisi pesan yang tak terhindarkan bahwa perbedaan etnis telah bergabung menjadi satu identitas baru, yaitu warga negara Tiongkok. Pembukaan daerah etnis minoritas sebagai salah satu kebijakan pemerintah disengaja dirancang untuk menunjukkan kepada dunia keragaman budaya Tiongkok dan integrasi minoritas (Matthews and Richter, 1991). Hal ini menguatkan pemerintah Tiongkok untuk memperkaya budaya dan menunjukkan pada dunia betapa besarnya Tiongkok. Sebuah pilihan rasional bahwa lebih baik memperlihatkan betapa besarnya Tiongkok lewat budaya daripada mengisolasi wilayah minoritas ini. Konsekuensi berat akan didapat Tiongkok apabila budaya isolasi makin dilanggengkan. Dengan adanya pengakuan budaya menjadi satu kesatuan, maka ini akan menjadi cara halus bagi Tiongkok

untuk tetap menguasai Tibet tanpa perlu melakukan pemaksaan dalam bentuk kekerasan.

Usaha Tiongkok dalam mempertahankan hegemoninya juga terlihat ketika *Tibet Development Forum* diselenggarakan. Forum ini merupakan sub-program *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme* dan diselenggarakan pada tanggal 12 – 13 Agustus 2014. Peserta melibatkan lebih dari 100 orang yang mana 40-nya adalah peserta internasional dari 33 negara seperti India, AS, Inggris, Rusia, Australia, dll. Forum ini dikatakan sebagai bentuk propaganda karena informasi yang disediakan sangat terbatas. Informasi mendasar seperti pembahasan forum hanya disiarkan oleh media Tiongkok dengan bahasa Mandarin. Dikatakan bahwa tujuan utama dari forum ini adalah untuk 'membawa Tibet ke dunia dan membantu dunia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Tibet'. Maka dari itu forum ke-empat ini dilaksanakan di Lhasa, agar peserta secara langsung menikmati Tibet 'baru' yang telah dikembangkan Tiongkok.

*Tibet Development Forum* berisikan pembacaan konsensus yang telah dirancang oleh Tiongkok jauh sebelum forum diselenggarakan. Konsensus yang dikenal dengan Konsensus Lhasa ini mempertegas usaha propaganda Tiongkok di dunia internasional. Sebagai contoh, artikel pertama dalam dokumen menyatakan bahwa, "para peserta forum telah melihat bahwa Tibet menikmati

pertumbuhan ekonomi yang sehat, keharmonisan sosial, budaya Tibet yang dilindungi dan pemandangan alam yang indah, serta orang-orang menikmati kehidupan dengan bahagia". Bagian yang lebih bermasalah dari dokumen ini terletak di artikel tujuh, yang berkaitan dengan Dalai Lama dan media Barat, menyatakan bahwa, "para peserta dengan suara bulat setuju bahwa apa yang sebenarnya mereka lihat di Tibet berbeda jauh dari apa yang dikatakan Dalai Lama ke-14 dan semua pemberitaan media Barat seringkali bias hingga menyebabkan banyak kesalahpahaman".

Selain kritikan keras terhadap Dalai Lama dan media Barat, Konsensus Lhasa memuat tentang kebijakan ekonomi Tiongkok di Tibet. Namun, yang penulis soroti adalah kutipan dua artikel di atas, karena menunjukkan bahwa Tiongkok membutuhkan pengakuan internasional sebagai 'penyelamat' Tibet. Tidak ada satupun artikel yang memutuskan kebijakan baru atau adopsi rencana masa depan terkait pengembangan Tibet ke depannya. Sisa isi dokumen Lhasa Konsensus menguraikan bahwa semua peserta telah memperhatikan isi artikel, menyiratkan bahwa tujuan Tibet Development Forum adalah untuk mencari dukungan peserta internasional tentang perubahan positif di Tibet daripada membahas masalah substantif.

Tidak semua peserta forum setuju dengan isi Konsensus Lhasa, namun mereka memilih untuk menghindari pernyataan politik. Secara umum, peserta

setuju bahwa Tibet telah berkembang dengan baik dan ekologi serta budayanya terlindungi dengan baik. Peserta seakan lupa bahwa keterlibatan mereka dalam forum sangat berpengaruh besar dalam melegitimasi Tiongkok di Tibet. Ketika para peserta forum menikmati keramahtamahan Tiongkok, masyarakat Tibet yang berunjuk rasa secara damai di luar forum ditembak oleh pasukan keamanan Tiongkok, menyebabkan 10 korban jiwa. Sedangkan di sisi lain, Tiongkok menerima kesan positif berkat keberhasilan pengembangan Tibet. Masyarakat Tibet berkomentar bahwa tentu mudah menggiring opini peserta forum mengingat rencana perjalanan mereka diatur sedemikian rupa agar mengunjungi objek wisata pilihan. Hasilnya tentu berupa cerita yang menyatakan keajaiban pencapaian Tiongkok di Tibet (Free Tibet, 2016). Realita perkembangan ekonomi di Tibet adalah mayoritas masyarakat Tibet terpinggirkan sebagai penonton ketika para migran dan pebisnis Tiongkok mendapat keuntungan maksimal. Terlepas dari kemajuan tersebut lebih dirasakan oleh imigran Han, Tiongkok telah berhasil memperkuat posisinya sebagai negara adidaya.

## 5. KESIMPULAN

*Tibet Tourism Master Plan* berhasil meresmikan jalur kereta Qinghai-Tibet yang kemudian meningkatkan jumlah wisatawan di Tibet. Tidak hanya wisatawan, adanya kalayang ini juga

meningkatkan jumlah imigran dengan orientasi ekonomi untuk masuk ke Tibet. Potensi ekonomi yang lebih banyak berada di daerah urban dikuasai oleh imigran Han. Sedangkan masyarakat Tibet direlokasi ke daerah rural yang notabene lebih sepi pengunjung. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan serta hubungan yang bersifat struktural antara masyarakat Tibet dengan masyarakat Han. Sehingga dapat dikatakan, Tibet Tourism Master Plan berisikan kepentingan ekonomi untuk masyarakat Han di Tibet.

Selain bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Han di Tibet, Tibet Tourism Master Plan berisikan kepentingan hegemoni Tiongkok. Jalur kereta Qinghai-Lhasa merupakan simbol keberadaan Tiongkok di Tibet. Menyiratkan bahwa tidak masuk akal apabila masyarakat Tibet masih menginginkan kemerdekaan setelah semua pembangunan dan modernisasi yang diberikan Tiongkok di sana. Tiongkok juga berusaha memperkuat hegemoninya di mata dunia internasional. Salah satu program UNDP di Tibet adalah melaksanakan *Tibet Development Forum* secara berkala. Di pelaksanaan forum yang ke-empat kalinya barulah Tiongkok berani untuk menyelenggarakannya langsung di Lhasa. Hal ini disebabkan karena Tiongkok perlu memastikan Tibet 'layak' dipresentasikan terlebih dahulu. Hasilnya, peserta forum yang merupakan representasi berbagai negara mengakui bahwa Tibet telah mengalami kemajuan setelah menjadi bagian Tiongkok.

Pengakuan ini kemudian semakin memperkuat legitimasi Tiongkok atas Tibet.

regarding-lhasa-forum-development-tibet

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2010). *Is Development Killing Tibet's Way Of Life?*.  
Diakses pada 14 September 2018, dari: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-10638506>
- Birch, A. H. (1989). *Nationalism and National Integration*. London: Routledge
- Case Western Reserve University. *Economic Patterns of the Tibet Autonomous Region: The Past and Present*. Diakses pada 18 Desember 2018, dari: <https://case.edu/affil/tibet/moreTibetInfo/documents/TibetEconomy2.pdf>
- Cultural Survival. (2010). *Close Encounters: "Intimate" Tourism in Tibet*. Diakses pada 14 September 2018, dari: <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/close-encounters-intimate-tourism-tibet>
- Fischer, Andrew M. (2004). *Urban Fault Lines in Shangri-La: Population and Economic Foundations of Interethnic Conflict in the Tibetan Areas of Western China*. London: Development Studies Institute
- Fischer, Andrew M. (2006). *The Political Economy of Boomerang Aid in China's Tibet*. China Perspective No. 3, 38-54. Diakses pada 18 Desember 2018, dari: <http://chinaprospectives.revues.org/4842?file=1>
- Free Tibet. (2016). *Free Tibet Statement Regarding Lhasa Forum on the Development of Tibet*. Diakses pada 20 Maret 2019, dari: [https://freetibet.org/news-media/pr/free-tibet-statement-](https://freetibet.org/news-media/pr/free-tibet-statement-regarding-lhasa-forum-development-tibet)
- Gladney, D. C. (1998). *Internal Colonialism and China's Uyghur Muslim Minority*. ISIM Newsletter
- Human Rights Watch. (2012). *China: Attempts to Seal Off Tibet from Outside Information*. Diakses pada 20 Februari 2019, dari: <https://www.hrw.org/news/2012/07/13/china-attempts-seal-tibet-outside-information>
- Laffite, G. (2017). *Saving Tibetans from Tibet: Poverty Alleviation with Chinese Characteristic*. Tibet Policy Institute
- Luo, L. (2008). *The Economy of Tibet: Transformation from a Traditional to a Modern Economy*. Beijing: Foreign Language Press
- Matthews, H. G., and L. K. Richter. (1991). *Political Science and Tourism*. Annals of Tourism Research 18:120-135.
- Moleong, J.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Ritcher, L. (1980). *The Political Uses of Tourism: A Philippine Case Study*. Diakses pada 3 Agustus 2018, dari: <http://www.jstor.org/stable/4190753>
- Save Tibet. (2008). *Interpreting Tibet: A Political Guide To Traveling In Tibet*. International Campaign for Tibet.
- Sautman, Barry. (2002). *Resolving the Tibet Question: Problems and Prospects*. Journal of Contemporary China, 11:30, 77-107
- Soyomukti, N. (2008). *Revolusi Tibet: Fakta, Intrik, dan Politik Kepentingan Tibet-China-Amerika Serikat*. Yogyakarta: Garasi
- The Strait Times. (2016). *China Pushes Tourism in Tibet, While Critics Fear Impact on Local Culture*. Diakses pada 14 September 2018, dari: [https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-pushes-tourism-in-tibet-](https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-pushes-tourism-in-tibet)

while-critics-fear-impact-on-local-culture

Tsering, D. (2017). *Understanding China's Economic Development Policies in Tibet: From Mao Zedong to Jiang Zemin Period*. Tibet Policy Institute

UNDP. (2006). *Tibet Development and Poverty Alleviation Programme*.

Government of the People's Republic of China and United Nations Development Programme

Yeh, Emily T. (2013). *Taming Tibet: Landscape Transformation and the Gift of Chinese Development*. London: Cornell University Press